

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Lithuania, selanjutnya disebut "Para Pihak";

MENIMBANG hubungan bilateral antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama, secara resiprokal, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari Republik Indonesia dan Republik Lithuania ke masing-masing negara;

SESUAI dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut;

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Lithuania. Setiap jangka waktu masa tinggal tidak dapat melebihi 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal masuk.

Namun, jangka waktu dari keseluruhan masa tinggal tidak dapat melebihi 90 (sembilan puluh) hari dalam kurun waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.

2. Warga Negara Republik Lithuania, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, tidak diwajibkan memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal masuk.

3. Pembebasan dari keharusan memperoleh visa sebagaimana termuat diatas tidak berlaku untuk warga negara dari salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, untuk melakukan kegiatan yang bersifat mendatangkan keuntungan di negara Pihak lainnya.

PASAL 2
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

Warga negara dari masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas dan ditugaskan di wilayah negara Pihak lainnya sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler atau perwakilan untuk organisasi internasional, beserta anggota keluarga inti mereka, wajib memperoleh visa yang sesuai sebelum memasuki wilayah negara Pihak lain tersebut.

PASAL 3
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

1. Warga Negara dari masing-masing pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, pada setiap titik lintas batas yang terbuka untuk lalu lintas internasional.

2. Para Pihak wajib segera memberitahukan mengenai perubahan dalam hukum dan peraturan masing-masing negara yang mengatur mengenai ketentuan masuk dan keluar bagi warga negara asing.

PASAL 4
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lain.

PASAL 5
HAK PEJABAT BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara dari salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas, dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah negara Pihak lain.

2. Persetujuan ini tidak membatasi hak pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak untuk menolak masuk atau memperpendek masa tinggal dari warga negara dari Pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Persetujuan ini, apabila mereka dinyatakan sebagai pihak yang tidak dikehendaki atau dicurigai dapat membahayakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau keamanan nasional.

PASAL 6
PENANGGUHAN

1. Salah satu Pihak berhak menunda sementara pelaksanaan Persetujuan ini secara sebagian maupun keseluruhan, untuk alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat.

2. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai penangguhan maupun kelanjutan kembali pelaksanaan dari Persetujuan ini. Pelaksanaan penangguhan dan penghentian penangguhan dari Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan dari Pihak lainnya.

3. Penangguhan dari pelaksanaan Persetujuan ini tidak berpengaruh pada hak warga negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dari Persetujuan ini, yang telah berada di dalam wilayah negara penerima.

PASAL 7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinasnya, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya Persetujuan ini.

2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dinas baru, atau modifikasi terhadap paspor yang masih berlaku, Para Pihak wajib saling memberikan contoh dari paspor tersebut dan memberitahukan secara tertulis, mengenai setiap perubahan, melalui saluran diplomatik, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

3. Apabila warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau dinasnya di wilayah Pihak lain, mereka wajib segera memberitahukan kepada pejabat berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler negara asal mereka, untuk dapat dilakukan tindakan semestinya. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan, sesuai dengan hukum dan peraturan di negaranya, wajib menerbitkan kepada warga negara tersebut paspor baru atau dokumen perjalanan untuk kembali ke negara asal.

PASAL 8
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah hanya dengan persetujuan bersama dari para Pihak. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 10, paragraf 1 dari Persetujuan ini, dan wajib dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan atau penafsiran ketentuan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau perundingan antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak telah saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana ditetapkan dalam prosedur hukum internal masing-masing negara, telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

3. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini kapan saja, dengan pemberitahuan tertulis, melalui saluran diplomatik. Pengakhiran Persetujuan ini wajib berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan pengakhiran dari Pihak lainnya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, dalam dua rangkap, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Lithuania, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA**
RETNO L.P. MARSUDI	**LINAS ANTANAS LINKEVIČIUS**
MENTERI LUAR NEGERI	MENTERI LUAR NEGERI

-



REPUBLIK INDONESIA

INDONEZIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUSITARIMAS
DĖL VIZŲ REŽIMO PANAIKINIMO
DIPLOMATINIŲ IR TARNYBINIŲ PASŲ TURĖTOJAMS

Indonezijos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, toliau – Šalys,

atsižvelgdamos į draugiškus abiejų Šalių santykius;

siekdamos toliau stiprinti draugiškus santykius bei bendradarbiavimą ir abipusiškumo pagrindais palengvinti Indonezijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams keliones į atitinkamas valstybes;

vadovaudamosi galiojančiais atitinkamos valstybės įstatymais ir kitais teisės aktais,

s u s i t a r ė :

1 straipsnis
Vizų režimo panaikinimas

1. Indonezijos Respublikos piliečiams, turintiems galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus, netaikomas reikalavimas gauti vizą, norint atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją, vykti per ją tranzitu ar būti joje. Kiekvieno

buvimo šalyje trukmė neturi viršyti trisdešimties (30) dienų, skaičiuojant nuo atvykimo dienos. Tačiau bendra buvimo šalyje trukmė turi būti ne ilgesnė nei devyniasdešimt (90) dienų per bet kurį šimto aštuoniasdešimties (180) dienų laikotarpį.

2. Lietuvos Respublikos piliečiams, turintiems galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus, netaikomas reikalavimas gauti vizą, norint atvykti į Indonezijos Respublikos teritoriją, vykti per ją tranzitu ar būti joje ne ilgiau kaip trisdešimt (30) dienų, skaičiuojant nuo atvykimo dienos.

3. Pirmiau minėtas vizų režimo panaikinimas netaikomas tiems galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus turintiems Šalių valstybių piliečiams, kurie atvyksta į kitos Šalies valstybę užsiimti komercine veikla.

2 straipsnis

Reikalavimas turėti vizą diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų darbuotojams

Bet kurios Šalies valstybės piliečiai, kurie turi galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus ir yra kitos Šalies valstybės teritorijoje veikiančių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų darbuotojai arba tarptautinių organizacijų atstovai, įskaitant jų šeimos narius, privalo prieš atvykdami į šalį gauti atitinkamą vizą.

3 straipsnis

Atvykimo ir išvykimo sąlygos

1. Šio Susitarimo 1 straipsnyje nurodyti Šalių valstybių piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus, gali atvykti į kitos Šalies valstybės teritoriją ir išvykti iš jos per bet kuriuos tarptautinius atvykimo ir išvykimo punktus.

2. Šalys nedelsdamos praneša viena kitai apie bet kokius atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais reglamentuojamas užsieniečių atvykimas į šalį ir buvimas joje, pakeitimus.

4 straipsnis
Pasų galiojimo trukmė

Bet kurios Šalies valstybės piliečių turimi diplomatiniai ar tarnybiniai pasai prieš jiems atvykstant į kitos Šalies valstybės teritoriją turi galioti ne trumpiau kaip šešis (6) mėnesius.

5 straipsnis
Institucijų teisės

1. Šiuo Susitarimu Šalių valstybių piliečiai, turintys diplomatinius ar tarnybinius pasus, neatleidžiami nuo pareigos laikytis kitos Šalies valstybės teritorijoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

2. Šis Susitarimas neturi įtakos kitos Šalies valstybės kompetentingų institucijų teisei neleisti į savo valstybės teritoriją atvykti šio Susitarimo 1 straipsnyje nurodytiems kitos Šalies valstybės piliečiams ar sutrumpinti jų buvimą toje teritorijoje, jei jie laikomi nepageidaujamais ar gali kelti pavojų visuomenės rimčiai, viešajai tvarkai, visuomenės sveikatai ar valstybės saugumui.

6 straipsnis
Sustabdymas

1. Bet kuri Šalis gali laikinai sustabdyti šio Susitarimo – viso ar jo dalies – galiojimą valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar visuomenės sveikatos sumetimais.

2. Apie sprendimą laikinai sustabdyti ar vėl atnaujinti šio Susitarimo galiojimą raštu diplomatiniais kanalais iš anksto pranešama kitai Šaliai. Susitarimo galiojimo sustabdymas ar atnaujinimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai (30) dienų nuo tada, kai tokį pranešimą gauna kita Šalis.

3. Susitarimo galiojimo sustabdymas neturi įtakos šio Susitarimo 1 straipsnyje nurodytų piliečių, jau esančių priimančiosios valstybės teritorijoje, teisėms.

7 straipsnis

Pasų pavyzdžiai ir kelionės dokumentų išdavimas

1. Šalys per trisdešimt (30) dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo diplomatiniais kanalais pasikeičia savo diplomatinių ir tarnybinių pasų pavyzdžiais.

2. Pradėjusios naudoti naujus ar pakeitusios esamus diplomatinius ir tarnybinius pasus, Šalys viena kitai perduoda jų pavyzdžius ir praneša apie bet kokius pakeitimus raštu diplomatiniais kanalais ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki jų oficialaus pakeitimo.

3. Tais atvejais, kai vienos Šalies valstybės pilietis pameta ar sugadina savo galiojantį diplomatinį ar tarnybinį pasą kitos Šalies valstybės teritorijoje, jis (ji) nedelsdamas (-a) per savo šalies diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą praneša apie tai priimančiosios valstybės kompetentingoms institucijoms, kad būtų imtasi reikiamų veiksmų. Atitinkama diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, vadovaudamasi savo šalies teisės aktais, išduoda minėtam asmeniui naują pasą ar kelionės dokumentą, kad jis (ji) galėtų grįžti į savo šalį.

8 straipsnis

Susitarimo pakeitimai

Šis Susitarimas gali būti keičiamas tik abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu. Toks pakeitimas įsigalioja šio Susitarimo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir yra neatsiejama šio Susitarimo dalis.

9 straipsnis

Ginčų sprendimas

Visus ginčus ar nesutarimus dėl šio Susitarimo taikymo ar aiškinimo Šalys sprendžia taikiai konsultacijomis ir (ar) derybomis diplomatiniais kanalais.

10 straipsnis

Susitarimo įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1. Susitarimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai (30) dienų nuo tos dienos, kai buvo gautas paskutinis rašytinis pranešimas, kuriuo Šalys diplomatiniais kanalais praneša viena kitai pagal valstybių vidaus procedūras įvykdžiusios visus šiam Susitarimui įsigalioti būtinus reikalavimus.

2. Šis Susitarimas galioja neribotą laiką.

3. Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, raštu diplomatiniais kanalais pranešdama apie tai kitai Šaliai. Susitarimas nustoja galioti praėjus devyniasdešimčiai (90) dienų nuo tada, kai kita Šalis gavo rašytinį pranešimą apie Susitarimo nutraukimą.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Pasirašyta 2015 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienį, Džakartoje dviem originaliais egzemplioriais indoneziečių, lietuvių ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl jų aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

Indonezijos Respublikos
Vyriausybės vardu

Retno L.P. Marsudi
Užsienio reikalų ministrė

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vardu

Linas Antanas Linkevičius
Užsienio reikalų ministras



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

ON

THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as "the Parties";

CONSIDERING the friendly relations between the Parties;

DESIRING to further strengthen their friendly relations and cooperation, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of holders of diplomatic and service passports of the Republic of Indonesia and the Republic of Lithuania into their respective countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the

territory of the Republic of Lithuania. Each period of stay shall not exceed 30 (thirty) days from the date of entry. However, the total period of stay shall not exceed 90 (ninety) days in any period of 180 (one hundred and eighty) days.

2. Nationals of the Republic of Lithuania, holders of valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days from the date of entry.

3. The above-mentioned exemption of visa requirements is not applied to the nationals of the State of either Party, who are holders of valid diplomatic or service passports, to take any gainful activities in the State of the other Party.

ARTICLE 2
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

Nationals of the State of either Party, who are holders of valid diplomatic or service passports and assigned as members of diplomatic missions or consular posts as well as representatives of international organizations, located in the territory of the State of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa prior to their entry.

ARTICLE 3
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

1. Nationals of the State of either Party, holders of valid diplomatic or service passports mentioned in Article 1 of this Agreement, may enter and leave the territory of the State of the other Party at any border crossing points designated for international passenger traffic.

2. The Parties shall inform each other immediately of any changes in their respective laws and regulations governing the entry and stay of foreigners.

ARTICLE 4
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of the State of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the State of the other Party.

ARTICLE 5
THE RIGHTS OF AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of the State of either Party, holders of diplomatic or service passports, from the obligation to respect the laws and regulations enforced in the territory of the State of the other Party.

2. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of the State of either Party to refuse admission or to shorten the stay in its territory of nationals of the State of the other Party, specified in Article 1 of this Agreement, who are considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

ARTICLE 6
SUSPENSION

1. Either Party may temporarily suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The other Party must be notified in advance in writing through diplomatic channels about the suspension and re-entering into force of this Agreement. The implementation of the suspension and termination of suspension of this

Agreement shall enter into force thirty 30 (thirty) days from the date of the receipt by the other Party.

3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of nationals, mentioned in Article 1 of this Agreement, who are already staying in the territory of the receiving State.

ARTICLE 7
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The Parties shall exchange specimens of their diplomatic and service passports through diplomatic channels within 30 (thirty) days from the entry into force of this Agreement.

2. In case of introduction of new diplomatic or service passports, as well as modifications to the existing ones, the Parties shall transmit the specimens of the said passports and inform about any changes, to each other in writing, through diplomatic channels not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.

3. In case of a national of the State of either Party loses or damages his or her valid passport in the territory of the State of the other Party, he or she shall immediately inform the competent authorities of the receiving Party, through diplomatic mission or consular post of the country of his or her nationality, for appropriate action. The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned national a new passport or travel document for returning to the country of his or her nationality, in conformity with the legislation of his or her country.

ARTICLE 8
AMENDMENTS

This Agreement may be amended only by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall enter into force according to the provision of Article 10, paragraph 1 of this Agreement, and shall form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 9
DISPUTES SETTLEMENT

Any difference or disputes arising between the Parties on the implementation or interpretation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in their respective internal procedures, have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.

3. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect 90 (ninety) days after the date of the receipt of the written notification of termination by the other Party.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized, have signed this Agreement.

DONE in Jakarta on Thursday, 27 August 2015, in two originals, each in the Indonesian, Lithuanian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in their interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
	
RETNO L.P. MARSUDI	**LINAS ANTANAS LINKEVIČIUS**
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS	MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS